

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2019**

KATA PENGANTAR

Penyajian laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 merupakan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Fungsi dan Tugas pokok Dinas.

Laporan ini merupakan gambaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Kegiatan Tahun 2019 dievaluasi dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai jadwal.

Dalam laporan ini dapat diukur manfaat organisasi hingga terwujudnya *Good Governance* yang lebih berkualitas, transparan dan partisipatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019, semoga dapat bermanfaat.

Kupang, 2019
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ganef Wurgiyanto, A.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 196310101989031030

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mempertanggung jawabkan kinerja suatu organisasi secara transparan, bersih, berhasil guna, perlu disusun laporan yang Akuntabel untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur diukur melalui indikator kinerja input, output, outcome dan benefit bahkan sampai dengan impact.

Secara keseluruhan dalam Tahun Anggaran 2019, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelola anggaran dari 3 (Tiga) sumber dana masing-masing :

1. DPA dari APBD I
Total Anggaran DPA Tahun 2019 (Belanja Publik) sebesar Rp 61.516.160.000,00,- untuk 4 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan hasil akhir pencapaian realisasi fisik sebesar 99,42 % dan keuangan 95,29 % atau Rp. 58.617.352.106;
2. Dekonsentrasi APBN Pusat.
Pengelolaan APBN secara keseluruhan mencapai Rp. **3.576.456.000,-** dengan realisasi pelaksanaan fisik mencapai 99,58 % dan keuangan 96,09 % atau Rp. **3.436.509.700,-**
3. Pengelolaan DAK untuk tahun 2019 yaitu Rp. 7.788.708.000 dengan realisasi keuangan Rp. 7.284.187.000 (93,52 %)
4. PAD Dinas Kelautan dan Perikanan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.420.437.799,-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran umum	1
BAB II. RENCANA STRATEGIS	3
A. RENSTRA Organisasi	3
1. Visi	3
2. Misi	3
3. Tujuan dan Sasaran	4
3.1. Tujuan	4
3.2. Sasaran	4
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019.....	5
C. Penetapan Kinerja 2019	6
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	7
A. Analisis capaian kinerja	7
a. Indikator Kinerja	7
b. Pengukuran Kinerja	8
B. Akuntabilitas keuangan	14
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	17
B. Saran	17

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019.
2. Realisasi Kinerja (PKT) Tahun 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk/format pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pencapaian Visi dan Misi yang dibebankan kepada instansi pemerintah yang berisi informasi seputar pencapaian pelaksanaan rencana kerja.

Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk :

- Mendorong Instansi pemerintah melaksanakan good governance, secara Transparan, Sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Memberikan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*)
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKIP ini adalah sebagai tindak lanjut (respon) terhadap Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya adalah mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Rencana Kerja Tahunan 2019.

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 20 tahun 2009, tanggal 21 Januari 2019.

Jumlah pegawai yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 142 orang dengan 30 jabatan struktural dan fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Jabatan Eselon II/a
- 13 Jabatan Eselon III/a
- 13 Jabatan Eselon IV/a
- 105 Fungsional Umum

Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga dalam bidang ***Kelautan dan Perikanan***.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai fungsi :

- A. Pembinaan Umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- B. Pembinaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- C. Pembinaan dan pengamanan di bidang Kelautan dan Perikanan
- D. Pembinaan dan perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan
- E. Penyelenggaraan Penyuluhan di bidang Kelautan dan Perikanan
- F. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai dan pulau-pulau kecil
- G. Pengembangan dan penguatan sistem informasi Kelautan dan Perikanan
- H. Penyelenggaraan rehabilitasi ekosistem/habitat sumberdaya kelautan
- I. Penelitian dan pengembangan teknologi Kelautan dan Perikanan
- J. Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi spesifik dan/anjuran
- K. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- L. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

B A B II

RENCANA STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

1. VISI

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 10 ayat (2) mengamanatkan bidang kelautan dan perikanan sebagai kewenangan pilihan karena potensi sumber daya kelautan dan perikanan merupakan potensi unggulan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah dan andalan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Hal ini perlu dibarengi dengan upaya kerja keras dan kesungguhan hati, sehingga dapat mewujudkan harapan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan. Oleh karena itu, visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTT YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI NKRI”**.

2. MISI

Masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya merupakan pelaku utama pembangunan kelautan dan perikanan. Oleh karena itu masyarakat adalah subyek dan sekaligus obyek pembangunan secara berkelanjutan, yang diarahkan pada keharmonisan antara kesejahteraan, pemerataan , pertumbuhan, dan berkelanjutan, sesuai dengan daya dukung lingkungan. Untuk itu, misi pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

- 1) Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur;
- 2) Meningkatkan kemampuan, keterampilan SDM dan daya saing dalam menguasai dan menerapkan inovasi teknologi yang terbaru dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan berorientasi ekspor.
- 3) Meningkatkan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menjaga kualitas dan ekosistem lingkungan.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan

- 5) Meningkatkan kemampuan dan kinerja aparaturnya untuk mewujudkan good governance dan clean governance.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Visi dan Misi tersebut di atas, pada hakekatnya ditujukan untuk :

3.1. TUJUAN:

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam kerangka pembangunan jangka menengah adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya;
- 2) Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian daerah Nusa Tenggara Timur;
- 3) Meningkatkan Daya Saing Provinsi NTT dalam Produksi dan Nilai Produksi Perikanan melalui Industrialisasi dan berorientasi ekspor.
- 4) Mewujudkan kondisi lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan terciptanya kelestarian daya dukung;
- 5) Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Nusa Tenggara Timur;
- 6) Meningkatkan peran laut sebagai pemersatu dan menguatnya budaya bahari masyarakat Nusa Tenggara Timur.
- 7) Mendorong kecukupan pangan dan pemenuhan gizi bagi masyarakat.
- 8) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT
- 9) Membuka lapangan Pekerjaan
- 10) Mendorong Kontribusi Provinsi NTT terhadap PDRB dan penerimaan Negara

3.2. SASARAN :

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

- 1) Peningkatnya usaha dan kualitas sumberdaya manusia kelompok sasaran program (Nelayan, pembudidaya dan Pengolah/pelaku usaha).

- 2) Peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Penurunan tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 4) Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat;
- 5) Terciptanya kesadaran masyarakat bahwa laut sebagai sumber mata pencaharian, peningkatan pariwisata dan budaya bahari serta pemersatu bangsa.
- 6) Peningkatan potensi bahari (*biodiversity*);
- 7) Peningkatan kualitas produk olahan perikanan;
- 8) Peningkatan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah;
- 9) Terciptanya lapangan pekerjaan baru di bidang kelautan dan perikanan;
- 10) Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

B. RENCANA KINERJA

Bertolak dari kebijakan umum di atas guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan di Nusa Tenggara Timur, dirumuskan suatu kebijakan strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan yaitu: ***Pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara optimal, efisien dan berkelanjutan***".

Dari kebijakan strategis di atas, secara regional maupun sektoral dirumuskan 2 (dua) program strategis dengan pokok-pokok kegiatan masing-masing:

- I. Program yang didanai dari anggaran Dekonsentrasi :
 - A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP (01)
 - B. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap (03)
 - C. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya (04)
 - D. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (05)
 - E. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (06)
 - F. Program Pengelolaan Ruang Laut (07)
- II. Program yang di danai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK)

C. PENETAPAN KINERJA 2019

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Kinerja Tahun 2019 sesuai terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

a. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan dikategorikan dalam kelompok :

1.1. Masukan (Inputs)

Segala sesuatu yang diperlukan sehingga pelaksanaan kegiatan dan program dapat terlaksana.

1.2. Keluaran (Outputs)

Segala sesuatu yang berupa produk / jasa sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

1.3. Hasil (Outcomes)

Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

1.4. Manfaat (Benefits)

Kegunaan suatu keluaran yang dirasakan oleh masyarakat

1.5. Dampak (Impact)

Ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang diawali oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Penetapan Kinerja maka dilakukan pengukuran capaian kinerja dan metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja:

b. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan metode Penyimpulan Capaian Sasaran dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85 \%$: Sangat Berhasil
- $70 \% \leq X < 85 \%$: Berhasil
- $55 \% < X < 70 \%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55 \%$: Belum Berhasil

Dari 3 sasaran strategis yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 maka hasil capaian pengukuran kinerja sasaran dapat jelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja yang hendak dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang paling utama untuk dicapai Tahun 2019 adalah : total Produksi Perikanan sebesar 2.265.782.66* Ton dengan rincian Produksi Perikanan Tangkap sebesar 160.380,66 * Ton dan Produksi Perikanan Budidaya (rumput laut) sebesar 2.098.402* Ton, ekspor sebesar 1,49 ton, Angka konsumsi ikan tingkat Provinsi NTT tahun 2019 yaitu 38,84 Kg/Kapita/tahun. Untuk menunjang pencapaian komponen pokok ini diperlukan penambahan fasilitas sarana dan prasarana baik yang langsung diterima sasaran maupun pada pusat-pusat pengembangan perikanan, peningkatan pengetahuan - ketrampilan dan operasional Unit-Unit Pelaksana Teknis Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan kegiatan tahunan. Hasil analisis terhadap pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

2.1 Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Kesejahteraan Nelayan

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatnya produktivitas perikanan budidaya, perikanan tangkap sehingga meningkatnya tingkat kesejahteraan nelayan tangkap maupun pembudidaya ikan. Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Pengembangan Budidaya Perikanan, Pengembangan Perbenihan dan Budidaya Perikanan, Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Rutin Tempat Pelelangan Ikan PPI Oeba, Pengadaan Kapal, Pelayanan Perbaikan Sarana Penangkapan, sebesar Rp. 37.401.988.000,- mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 5.880.225.932 (15,72 %) jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 31.521.762.608,- dengan rincian anggaran Program Pengembangan Budidaya Rp. 12.826.773.750,- dan Program Perikanan tangkap sebesar Rp. 24.575.214.250,-

Tabel 1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capaian (%)	2019
				Target (Ton)	Realisasi (Ton)		
1	Prosentase Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	157.690,649	112.840	160.380,660*	101,70	160.380,660*
2	Prosentase Peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya (rumpun Laut)	Ton	1.941.707,49	1.913.242,32	2.098.402*	103	2.098.402*

2.1.1 Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Prosentase produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 yaitu 101,70 % atau 160.690.649* Ton dibandingkan dengan produksi tahun 2018 yaitu 157.690.649 Ton meningkat dikarenakan adanya pemberian bantuan sarana penangkapan berupa alat tangkap dan kapal tangkap terhadap nelayan sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat produksi perikanan tangkap sehingga tingkat pendapatan nelayan semakin meningkat.

2.1.2. Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Prosentase produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 yaitu 103 % atau 2.000.000* Ton dibandingkan dengan 2018 yaitu 1.941.707,49 Ton meningkat dikarenakan adanya pemberian bantuan sarana budidaya serta bibit rumput laut, sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat produksi perikanan tangkap sehingga tingkat pendapatan pembudidaya semakin meningkat.

2.2 Penurunan Tingkat Kerusakan Ekosistem dan Tingkat Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sasaran ini di tujuikan pada kawasan konservasi laut, areal hutan mangrove yang di koservasi serta penurunan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Program – program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produk perikanan dengan anggaran

Rp. 2.464.023.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Tabel 2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Prosentase Kawasan Konservasi Laut, Hutan Mangrove , dan Penurunan Tingkat Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capaian (%)	2019
				Target	Realisasi		
1	Jumlah Kawasan Konservasi Laut	Ha	1	-	-	0	0
2	Prosentase areal hutan mangrove yang di konservasi	Ha	16.593,19 Ha	-	1 Ha	100	16.594,19 Ha
3	Prosentase Penurunan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100	85	100	100	100

2.2.1 Jumlah Kawasan Konservasi Laut

Sama seperti tahun 2018 untuk tahun 2019 tidak ada penambahan kawasan konservasi.

2.2.2. Prosentase Areal Hutan Mangrove yang di Koservasi

Prosentase Areal Hutan Mangrove yang dikonservasi Pada tahun 2019 yaitu 100 % di karenakan pada 2018 untuk konservasi tidak mempunyai target, akan tetapi pada tahun 2019 ada penanaman anakan mangrove di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara masing – masing sebanyak 5.000 anakan atau 1 Ha.

2.2.3. Prosentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Prosentase penurunan tingkat pelanggaran Pemafaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2019 sebanyak 85 % di karenakan tingkat kesadaran nelayan telah baik, dalam gelar operasi bersama yang dilaksanakan oleh

Dinas Kelautan dan Perikanan, Polisi Perairan dan TNI AL melakukan pemeriksaan kapal nelayan sebanyak 88 kapal, dan terdapat 2 kapal yang kelengkapannya tidak ada.

2.3. Meningkatnya Kontribusi dan Produktifitas Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Perekonomian

Sasaran ini ditujukan pada sumbangan sektor perikanan dan kelautan terhadap perekonomian daerah Nusa Tenggara Timur, yang mana sasarnya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ekspor Perikanan, Penyerapan tenaga kerja program – program yang mendukung sasaran ini yaitu Program Pengembangan Penyuluhan, Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Tabel 3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi
Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Perekonomian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capaian %	2019
				Target	Realisasi		
1.	Jumlah Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Rp	1.302.191.600	1.125.125.000	2.420.437.799	215	2.420.437.799
2.	Ekspor Perikanan	Ton	1,281	3.300	1,49	115,72	1,49
3.	Rumah Tangga Perikanan Tangkap	Orang	33.184		33.369	115,13	33.369

2.3.1. Prosentase Jumlah Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah

Prosentase jumlah kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah tahun 2019 yaitu 215 % atau Rp. 2.420.437.799,- dibandingkan dengan tahun 2018 Rp.1.302.191.600,- maka PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melebihi target sebesar Rp 1.118.246.199,-

2.3.2. Prosentase Ekspor Perikanan

Prosentase Ekspor Perikanan pada tahun 2019 yaitu 1,49 ton mengalami kenaikan sebesar sebesar 0,21 ton di bandingkan ekspor pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,281 ton ton.

2.3.3. Prosentase Penyerapan Tenaga Kerja Kumulatif

Prosentase penyerapan tenaga kerja rumah tangga perikanan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 33.369 unit atau (100,56%) dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 33.184 unit dikarenakan adanya bantuan kapal, serta hasil lulusan sekolah usaha perikanan (SUPM) yang ada di NTT.

2.4. Meningkatnya Kemampuan Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Sasaran ini diarahkan untuk peningkatan sumber daya manusia yang handal. Adapun sasarannya yaitu tenaga teknis yang ada pada dinas kelautan dan perikanan provinsi, yang mana mereka akan diberi pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Program – program yang mendukung sasaran ini adalah Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh dan Pendamping Perikanan, Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keragaman Produk Hasil Perikanan, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Pengembangan Pasar dalam Negeri dan Inovasi Pengolahan,,alokasi anggaran kegiatan Rp. 3.492.831.732 (tiga Miliar empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Tabel 4

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan Kualitas
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capean	Restra 2019
				Target	Realisasi		
1.	Jumlah Sumber daya manusia						
	Diklat Kesabandaran	Orang	0		1	100	4

2.4.1. Prosentase Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Mengikuti Diklat Pengawas Perikanan
Prosentase Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Diklat Kesabandaran yang dilaksanakan oleh Kementrian sebanyak 1 (satu) Orang.

2.5. Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat

Sasaran dalam rangka meningkatnya pola konsumsi ikan pada masyarakat, baik untuk konsumsi masyarakat didalam keluarga, luar keluarga (hotel warung penyedia olahan ikan) maupun konsumsi olahan perikanan (ibu hamil, ibu menyusui, bawa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun serta anak sekolah dasar yang di laksanakan di Kota Kupang di ikuti oleh 1.000 orang peserta, Kab. Ngada 200 orang peserta, Kab. Sabu Raijua 200 Orang Peserta dan Kab. Manggarai Barat 200 Orang Peserta.

Kegiatan perhitungan Angka konsumsi ikan tingkat Provinsi NTT tahun 2019 dilaksanakan di Kota Kupang yang di ikuti oleh 22 peserta dengan menghasilkan angka konsumsi ikan 38,84 Kg/Kapita/Tahun.

Tabel 5

Capean Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capean %	Restra 2019	2019
				Target	Realisasi			
1.	Konsumsi Ikan	%	Kg/Kapita/Tahun	40,14 Kg/Kapita/Tahun	38,84 Kg/Kapita/Tahun	96,76	40,14 Kg/Kapita/Tahun	38,84 Kg/Kapita/Tahun

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program /kegiatan pada dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 bersumber pada APBN, APBD dan DAK dengan rincian sebagai berikut :

ALOKASI DAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019

No	SUMBER DANA		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	APBD		61.516.160.000	58.617.352.106	95,29
	a.	Belanja Tidak Langsung	13.079.041.000	12.152.116.100	92,91
	b.	Belanja Langsung	48.437.119.000	46.465.236.006	95,93

1.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan,		12.826.773.750	12.530.384.548	97,69
2.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap,		24.756.244.250	23.920.841.800	97,34
3.	Program Pengembangan Penyuluhan, Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		2.464.023.000.	2.240.001.708.	90,91
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		2.304.539.000	2.179.494.800	94,57
2.	APBN				
	a.	Dekonsentrasi	3.576.456.000	3.436.509.700	96,09
		Sekretariat Jenderal (01)	1.024.221.000	1.014.760.500	99,08
		Ditjen Perikanan Tangkap (03)	444.320.000	444.320.000	100
		Ditjen Perikanan Budidaya (04)	564.285.000	563.079.200	99,79
		Ditjen PSDKP (05)	570.180.000	456.095.600	79,99
		Ditjen P2HP (06)	230.950.000	230.115.600	99,64
		Ditjen KP3K (07)	742.500.000	728.140.800	98,07
3.	DAK		7.788.708 .000	7.284.187.000	93,52
	1.	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD.PROVINSI)	4.644.000.000	4.189.860.000	90,22
	2.	Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-PROVINSI) dan Percontohan Budidaya Laut	1.610.708.000	1.601.074.000	99,40
	3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	459.000.000	438.558.000	95,55
	4.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Hasil Perikanan	500.000.000	495.000.000	99,99

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. APBD.

A. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Kurang SDM yang kualisasi pendidikan sarjana perikanan
2. Sarana dan prasarana pada instalasi Perbenihan khususnya BBIS Noekele banyak kolam yang bocor.
3. Kurangnya pelatihan bagi pembudidaya rumput laut serta kuranya bibit rumput laut bagi kelompok pembudidaya
4. Masih adanya pelanggaran beberapa armada penangkapan ikan terhadap jalur penangkapan dan terjadinya perebutan fishing ground yang memicu terjadinya konflik nelayan di kabupaten/kota.
5. Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan masih belum berimbang dengan tingkat kerusakan yang ada.

2. Upaya pemecahan Masalah

1. Penambahan tenaga teknis yang kualifikasi sarjana perikanan budidaya
2. Perlu memperbaiki sarana prasarana budidaya air tawar
3. Perlu bimtek bagi kelompok pembudidaya rumput
4. Gelar operasi bersama harus lebih dilakukan
5. Rehabilitasi mangrove

B A B V *P E N U T U P*

A. Kesimpulan

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 terealisasi sebagai berikut :

- a. Total Dana yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dari APBD I (belanja Publik) mencapai Rp. 61.516.160.000,00,- Realisasi pelaksanaan selama Tahun 2019 secara keseluruhan mencapai Fisk 99,42 % dan Keuangan Rp. 58.617.352.106;(95,29%).
- b. Pengelolaan APBN secara keseluruhan mencapai Rp. **3.576.456.000,-** dengan realisasi pelaksanaan fisik mencapai 99,58 % dan keuangan **96,09** % atau Rp. **3.436.509.700**
- c. Realisasi komponen target Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 adalah :
 - Produksi Perikanan tercapai 2.265.782,66* Ton dari target 2.177.161.01* Ton.
 - Ekspor Perikanan mencapai 1,49 Ton
 - Penerimaan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 2.420.437.799,- atau 215% dari target Rp. 1.125.125.000,-

B. Saran

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Satker di lapangan khususnya mendukung realisasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara kumulatif, melalui DPA perlu disediakan biaya pendamping Satker APBN secara berkesinambungan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi melalui berbagai program dan Satker di Tahun 2019, semoga bermanfaat.
